

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemerdekaan Indonesia tidak sepenuhnya memberikan makna kebebasan. Proklamasi yang dilakukan untuk melepaskan diri dari jajahan negara asing tidak menjamin bebasnya suatu negara akan perlawanan antar bangsanya sendiri. Bahkan di Indonesia, setelah kemerdekaan masalah-masalah dari dalam negeri mulai muncul dan mengakibatkan banyak pemberontakan. Seperti pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII besutan Kartosuwiryo, yang diinisiasi pada tanggal 10 sampai 11 Februari 1948 di Desa Pangwedusan, Cisayong, Tasikmalaya.¹ Organisasi ini mendasarkan gerakannya pada ideologi Islam yang bertentangan dengan ideologi Pancasila sebagai ideologi resmi negara Indonesia. Gerakan ini awalnya disusun di Jawa Barat kemudian menyebar ke seluruh pelosok Indonesia termasuk Sulawesi Selatan.

Di Sulawesi Selatan gerakan DI/TII diakomodir oleh tokoh militer nasional yang akrab disebut Abdul Kahar Muzakkar. Melalui gerakan ini Kahar Muzakkar membangun basis pergerakannya dari satu daerah ke daerah yang lain. Gerakan yang dijalankan oleh Kahar Muzakkar pada akhirnya tidak hanya dikenal sebagai gerakan



Lihat, Hersi Setiawan & Joebar Ayoeb. "SM. Kartosuwiryo, Orang Seiring Jalan ", Prisma, No. 5 Tahun XI, 1982. Hlm. 96. Bandingkan dengan lkk., Mengapa Mereka Memberontak ? Dedengkot Negara Islam Indonesia. rta : Bio Pustaka, 2008. Hlm 8.

DI/TII akan tetapi bermunculan nama-nama lain yang pada dasarnya istilah tersebut merujuk pada praktik gerakan yang dilakukan Kahar Muzakkar dan anggotanya. Beberapa istilah atau nama yang akrab disebut sebagai representasi dari DI/TII adalah *gerombolan* dan *gorilla*. Oleh karena itu untuk melihat gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan tentunya juga akan menjelaskan mengenai varian dari nama atau istilah yang disebutkan sebelumnya. Gerakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar tersebut tentunya memiliki dampak yang sangat kuat bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, baik dampak negatif maupun dampak positif. Terkait dengan berbagai dampak yang ditimbulkan dari aktivitas gerakan DI/TII Kahar Muzakkar, umumnya dampak negatif menjadi narasi besar dari setiap hasil studi yang dilakukan, sehingga asumsi yang terbangun sebelumnya cenderung menjustifikasi bahwa gerakan DI/TII Kahar Muzakkar atau yang disebut *gorilla* atau *gerombolan* itu cenderung bersifat destruktif. Seperti yang terjadi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan DI/TII menimbulkan persoalan dalam masyarakat.

Di Kabupaten Gowa misalnya, gerombolan ini dikenal dengan nama *Gorilla*. Mereka terkenal sebagai sekelompok kawan yang memakai pisau dan senapan mesin yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar. Gerombolan melakukan aksi di wilayah Gowa khususnya di dataran tinggi yang berdampak pada pengambilalihan penguasaan wilayah dan sistem administrasi pemerintahan di daerah



sehingga pemerintahan di dataran tinggi Kabupaten Gowa mengalami an yang mengakibatkan meluasnya aksi gerombolan tersebut. Meluasnya gerombolan di dataran tinggi Gowa mengakibatkan warga mengungsi di

tempat yang lebih aman. Masyarakat diancam dibunuh apabila tidak menuruti permintaan gerombolan tersebut.²

Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi DI/TII seringkali menimbulkan persoalan dalam masyarakat di berbagai daerah. Seperti yang terjadi di Buton Utara tepatnya di Kambowa, untuk membangun markas mereka melakukan aksi pemungutan pajak secara paksa pada masyarakat, jika tidak membayar pajak masyarakat akan dibunuh.³ Aktivitas DI/TII juga ditemukan di wilayah Kepulauan seperti yang terjadi di Sikeli dan Batuawu, wilayah Pulau Kabeana. Masyarakat menolak kedatangan gerombolan DI/TII, mereka secara paksa menggeleda perahu dan mengambil barang dagangan berupa kain seharga Rp. 1000 yang didatangkan dari Bau-bau. Mereka juga melakukan aksi pembajakan kapal dan penculikan perempuan untuk dijadikan istri.⁴

Gerombolan DI/TII juga melakukan kekejaman dan kekerasan terhadap masyarakat Pangkep. Mereka melakukan perlawanan terhadap *Bissu* yang ada di Pangkep karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.⁵ Dalam sebuah artikel

² St. Junaeda., Amirullah., “Gang Action and Shifting Patterns of Patron-Client Relations in Southeast Gowa 1958-1961”, *Atlantis Press*. Vol 226. 2018. Hlm. 1034-1037.

³ La Suriadin., dkk., “Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di a Buton Utara : 1958-1962”, *Jurnal Idea of History*. Vol 5(2). 2022. Hlm. 61. Haeruddin., “Penumpasan Pemberontakan DI/TII di Pulau Kabaena”, *Jurnal in Sejarah*. 2021. Hlm. 38.

Muh Iskandar Z., “Aktivitas Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) ep (1953-1959)”. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2019. Hlm 20.



menunjukkan aksi yang dilakukan oleh gerombolan di kampung Laika daerah Pangkajene. Sebuah mobil yang melakukan perjalanan dihentikan oleh gerombolan DI/TII yang berjumlah kurang lebih 40 orang, untungya pengemudi mobil berhasil kabur dan melaporkan penculikan ini.⁶ Kasus lain juga terjadi di Soreang daerah Pangkep, pada tahun 1956 penculikan dilakukan oleh pihak gerombolan namun berhasil digagalkan oleh TNI, Gerombolan juga melakukan penembakan terhadap truk pengangkut aparatur negara yang melawati kampung Soreang namun berhasil ditaklukan.⁷

Dari beberapa kasus aktivitas yang dilakukan DI/TII di masyarakat mulai dari Buton, Pulau Kabaena, Gowa dan Pangkep menandai satu ciri bahwa aktivitas yang dilakukan DI/TII cenderung berdampak pada praktik kekerasan. Konteks seperti ini menjadi penanda umum terhadap DI/TII sebagai organisasi yang dianggap melawan negara. Oleh masyarakat Sulawesi Selatan umumnya praktek tersebut diasumsikan sebagai praktek gerombolan, karena itu nama lain dari DI/TII adalah *gerombolan*. Akibat dari aktivitas yang dilakukan DI/TII yang meresahkan masyarakat, kemudian menjadi narasi *mainstream* ditengah masyarakat bahwa DI/TII adalah pemberontak. Konteks inilah yang mendasari suatu pemikiran penulis untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas-aktivitas yang dilakukan DI/TII yang pada dasarnya tidak semua Negatif.



“Ontvoeringen in Zuid-Celebes”. *Het Nieuwsblad Voor Sumatra*. Maandag us 1955. Hlm 2.

“TNI bevrijdt ontvoerden”. *De Nieuwsgier*. Vrijdag 27 Januari 1956. Hlm.

Dari beberapa narasi yang sudah dituliskan diatas menunjukkan bagaimana gerombolan DI/TII dikatakan sebagai pemberontak, karena menimbulkan keresahan diantara masyarakat dan menentang ideologi Pancasila yang sudah ada. Namun, dari beberapa pencarian sumber yang telah dilakukan mengatakan bahwa beberapa masyarakat juga menerima gerakan ini sebagai pembaharuan sistem sosial dan keagamaan. Seperti yang terjadi di Baraka, dikatakan bahwa sebelum kedatangan DI/TII masyarakat memang sudah menganut ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah karena itu dengan kedatangan DI/TII dianggap sebagai suatu pembaharuan untuk melaksanakan Islam tanpa dipengaruhi kebiasaan adata istiadat, Bid'ah, tahayul dan Khurafat.⁸ Narasi ini menunjukkan sisi positif kedatangan gerombolan DI/TII.

Narasi yang berbeda juga berasal dari masyarakat Desa Tompo Bulu tentang kedatangan DI/TII. Menurut keterangan dari narasumber, masyarakat Desa Tompo Bulu mengalami Islamisasi dari para gerombolan DI/TII yang pernah menduduki Desa.⁹ Setelah kedatangan gerombolan masyarakat Desa diajarkan ajaran Islam seperti bacaan Sholat dan Mengaji. Selain itu, para gerombolan juga mengajarkan hukum Islam yang keras. Mereka menganggap bahwa, segala kekerasan yang dilakukan gerombolan seperti membunuh merupakan akibat dari kesalahan pribadi



Nur Aisyah, dkk. "Baraka : Basis Pertahanan DI/TII di Sulawesi Selatan 5", *Jurnal Patingalloang*. Vol 5(1), 2018. Hlm. 58-59.

Hasil wawancara ini sangat subyektif oleh karena itu penjelasan mengenai i atau bagaimana masyarakat kemudian mendapatkan tambahan pengetahuan i keislaman akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

yang memang merupakan hukum Islam. DI/TII kemudian dikatakan memberikan pengaruh yang baik setelah kedatangannya karena berdampak pada perbaikan sikap masyarakat, seperti para pencuri kerbau yang sudah tidak ditemukan lagi karena takut akan hukum Islam.¹⁰ Karena itu, hingga saat ini Desa Tompo Bulu dikenal sebagai Desa yang masih sangat kental dengan hukum Islam.

Tompo Bulu dulunya dikenal dengan nama Bulu- Bulu¹¹ merupakan sebuah Desa di bawah kaki gunung Bulu' Saraung. Tompo Bulu merupakan sebuah Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Balocci yang memiliki luas wilayah 143,48 km^2 atau sekitar 12,90 % dari luas total Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Desa Tompo Bulu sendiri memiliki luas wilayah 57,52 km^2 atau sekitar 40,09 % dari total wilayah Kecamatan Balocci. Namun, Desa Tompo Bulu memiliki populasi penduduk paling sedikit di Kecamatan Balocci yakni 1.870 Jiwa dengan kepadatan penduduk 14 Jiwa/ km^2 .¹² Desa Tompo Bulu mempunyai penduduk mayoritas beragama Islam dengan suku Bugis Makassar dengan bahasa yang digunakan yakni bahasa *dentong* bahasa yang dimaksud tetap menggunakan bahasa Makassar tetapi dengan logat khas

¹⁰ Wawancara Mahmud. Laki-laki. Tompo Bulu, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. 6 Maret 2024. Pukul 10:00 Wita. 87 Tahun. Mantan gerombolan DI/TII yang bertugas sebagai guru mengaji.



¹¹ Pada awal pemerintahan H. Ambo Masse Dg. Malewa beliau mengeluarkan m baru bahwa kampung bulu'-bulu' dan kampung Padangtangnga telah menjadi suatu Desa yang diberi nama Desa "Tompo Bulu". (Wawancara bd Kadir Hakim S.Pd.I).

BPS. 2023. *Kecamatan Balocci dalam Angka 2023*. Pangkep : BPS.

orang Tompo Bulu.¹³

Desa Tompo Bulu masih melestarikan tradisi turun temurun dari para orang tua terdahulu seperti menyucikan hari Jum'at dengan menikah di hari Jum'at, penanaman pohon setiap melakukan hajatan, dilakukan tradisi barasanji setelah sholat subuh, dan larangan menjemur di depan rumah sebagai bentuk penghormatan atas tamu yang datang. Beberapa tradisi ini sudah dijadikan Perdes oleh Pemerintah Desa Tompo Bulu dan merupakan tradisi yang sudah ada sejak Kepala Desa pertama menjabat yakni H. Ambo Masse Dg. Malewa (1964-2001).¹⁴ Bentuk tradisi ini disinyalir sebagai warisan DI/TII karena memberikan pembaharuan Islam yang merubah masyarakat. Tradisi-tradisi inilah yang dikatakan sebagai tradisi turunan dari DI/TII atau bahkan memiliki pengaruh atas kedatangan DI/TII.

Setelah melakukan metode penelitian sejarah yakni pengumpulan sumber berupa wawancara dari salah satu mantan Gerombolan DI/TII di Tompo Bulu, dikatakan bahwa terdapat 4 kekarraengan yang berdiri yakni kekarraengan bersaudara Balocci, Amarro' dan Tonasa kemudian kekarraengan Padangtangnga¹⁵ yang merupakan keturunan Bone. Pada tahun 1813 ketika tersisa kekarraengan Balocci, Tonasa dan Padangtangnga pemerintahan dipimpin oleh seorang "Kapala" kemudian

¹³ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tompo Bulu 2022-2027.

¹⁴ *Wawancara Abd. Kadir*. Laki-laki. Tompo Bulu, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. 6 Maret 2024. 45 Tahun. Kepala Desa Tompo Bulu.



Istilah Kekaraengan Padangtangnga merupakan istilah yang digunakan menunjukkan nama kekarraengan sekaligus nama wilayah, saat ini di Desa Tompo Bulu lazim digunakan istilah Padattangnga yang menunjukkan nama karaeng araengan tersebut, namun dalam tulisan ini akan digunakan istilah tangnga merujuk pada kebanyakan sumber tertulis yang didapatkan.

pada tahun 1964 untuk menyatukan kekarraengan-kekarraengan tersebut dilakukan pemilihan pemimpin pemerintahan dan diubah menjadi “Kepala Desa”.¹⁶

Desa Tompo Bulu berada dalam lingkup Kecamatan Balocci, terlepas dari narasi positif masyarakat disana terdapat sumber yang menyatakan bahwa di Balocci sendiri para gerombolan DI/TII meresahkan masyarakat. Dalam sebuah koran memberikan keterangan mengenai penangkapan anggota gerombolan DI/TII karena telah menahan ratusan warga sipil, aksi ini dilakukan di wilayah Selatan Maros, Pangkajene dan Balocci.¹⁷ Meningkatnya keamanan di wilayah Pangkajene, Balocci, dan Tonasa terjadi karena operasi udara yang ditujukan untuk memusnahkan gerombolan DI/TII, ini dikarenakan meningkatnya aktivitas kekerasan yang mereka lakukan seperti pembunuhan, pembakaran, pengamukan, dan penculikan dikalangan penduduk lokal.¹⁸

Narasi-narasi kecil yang muncul tentang bagaimana dampak positif dan kebaikan DI/TII di masyarakat sangat bervariasi maka tulisan ini tidak sedang ingin membuktikan bahwa DI/TII adalah pemberontak atau tidak. Tulisan ini berfokus untuk mengoleksi dan mengumpulkan narasi kecil yang ada dalam masyarakat terkait dengan apa yang mereka pahami terhadap DI/TII yang secara spasial di fokuskan di Desa Tompo Bulu.



¹⁶ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tompo Bulu 2022-2027.

“Het Bendewezen in Celebes Honderden Gevangenen Door sacties Bevrijd”. *De Preangerbode* . Woensdag 11 April 1956. Hlm. 2.

“Tientallen Bendeleden Gedood Bij Acties in Oost-Indonesia”. *Indische Voor Nederland* . Woensdag 05 Juni 1957. Hlm. 2

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan meneliti mengenai aktivitas apa yang dilakukan oleh gerombolan DI/TII pada masyarakat Tompo Bulu dan menganalisis mengenai bagaimana masyarakat Tompo Bulu mengenang DI/TII. Karena itu penelitian ini diberi judul **“Masyarakat Tompo Bulu Pangkep dan Narasi Tentang DI/TII Tahun 1953-1965”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dilakukan oleh DI/TII pada masyarakat Tompo Bulu?
2. Bagaimana masyarakat Tompo Bulu mengenang DI/TII?

1.3 Batasan Masalah

1.3.1 Batasan Spasial

Penelitian ini memfokuskan spasial pada wilayah Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan sebagai tempat penelitian.

1.3.2 Batasan Temporal

Penelitian ini menggunakan batasan temporal tahun 1953 yang merupakan awal masa kedatangan gerombolan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan sekaligus mengumukan bahwa Sulawesi Selatan dan daerah sekitarnya menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia, selain itu dalam rujukan sejarah

juga menyatakan bahwa kedatangan gerombolan DI/TII terjadi pada masa pemerintahan Kapala terakhir wilayah Bulu-bulu yakni Pasumburi Dg Marowa



yang menjabat sejak tahun 1943 hingga 1964 dari sinilah kemudian menunjukkan bahwa pada kurun waktu tersebut gerombolan DI/TII datang ke Desa Tompo Bulu. Kemudian diakhiri tahun 1965 karena setelah kematian Kahar Muzakkar pada tahun 1965 para gerombolan sedikit demi sedikit telah meninggalkan Tompo Bulu.¹⁹ Batas periodeisasi ini didasarkan atas kependudukan Kahar Muzakkar dan para pasukan DI/TII di Tompo Bulu.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apa yang dilakukan oleh DI/TII pada masyarakat Tompo Bulu.
2. Untuk menganalisis bagaimana masyarakat Tompo Bulu mengenang DI/TII.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan tentang sejarah Desa Tompo Bulu dan menganalisis dampak dari kedatangan gerombolan DI/TII terhadap proses pembaruan keislaman yang terjadi di Desa Tompo Bulu. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini sendiri dapat dijadikan sebagai acuan dalam melestarikan lokasi Desa yang memiliki nilai sejarah



Wawancara Ambo Nai'. Laki-laki. Tompo Bulu, Kabupaten Pangkep, Selatan. 17 Maret 2004. Pukul 10:00 Wita. ±100 Tahun. Mantan lan DI/TII di Tompo Bulu

khusus. Desa Tompobulu sebagai Desa yang meraih penghargaan 75 Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 ini sekaligus akan menjadi tulisan informatif yang menunjang prestasi Desa tersebut. Sebagai bahan referensi penulisan dan menambah pengetahuan serta informasi tentang sejarah sosial dan sejarah pergerakan masuknya gerombolan DI/TII di hutan terkhususnya di Desa Tompo Bulu.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Digunakan berbagai penelitian untuk membantu dalam penulisan serta sebagai sumber yang mendukung topik dari penelitian ini. dalam penelitian ini dibutuhkan sumber primer maupun sumber sekunder sebagai acuan yang berkaitan dengan penelitian agar lebih terarah dalam penulisannya. Berikut adalah berbagai penelitian yang dianggap relevan dengan topik penulis :

Dalam tulisan yang berjudul *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke DI/TII* yang ditulis oleh Barbara Sillars Harvey (1989) A merupakan

yang tak jarang digunakan oleh para penulis untuk dijadikan sumber an saat melakukan penelitian tentang DI/TII. dalam buku ini diberikan



gambaran umum mengenai perjalanan Kahar Muzakkar dalam melakukan pemberontakan DI/TII di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Selain itu buku ini juga memberikan gambaran mengenai kondisi Sulawesi Selatan sebelum dan sesudah terbentuknya DI/TII sehingga akan memberikan gambaran terhadap peneliti mengenai kondisi umum yang terjadi di Sulawesi Selatan yang tentunya relevan dengan penelitian perubahan sosial masyarakat yang dilakukan oleh penulis.

Sebuah artikel yang juga menjadi relevan dengan penulisan ini adalah artikel yang ditulis oleh Agus Suwignyo yang berjudul “*Indonesiam National History Textbooks after the New Order*” memberikan gambaran bagaimana membaca narasi kecil yang berlawanan dengan narasi besar yang berbicara tentang pendidikan. Narasi besar sejarah adalah historiografi yang termuat dalam buku besar atau buku induk tetapi terdapat juga narasi kecil diluar narasi besar ini yang kemungkinan akan sedikit berbeda atau benar-benar berbeda dengan narasi besar yang ada.

Dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Nasihin, M.A yang berjudul “*Mnemohistory dan Problem Historiografi di Indonesia: Studi Kasus Tentang Kenangan Masa Perang Dunia II di Kendari*”. Dalam tulisan ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana peran Mnemohistory sebagai proses menentukan identitas dengan merekonstruksi masa lalu yang kemudian jadi bagian dari metode penelitian dan menjadi alur berfikir dalam



penulisan sejarah. mnemohistory juga akan memberikan pemahaman mengenai masa lalu yang telah kehilangan otonominya dan mendapatkan pemahaman secara terus menerus dari masa kini. Salah satu bentuk pengaplikasian dari mnemohistory ini adalah dengan memanfaatkan sumber-sumber lisan sebagai sumber utama dalam merekonstruksi masa lalu. Dengan menggunakan perspektif mnemohistory juga akan memperlihatkan bagaimana kemudian narasi-narasi kecil akan muncul dan dijadikan sebagai dasar dalam penentuan atributif berbagai sumber material yang sudah ada. Tulisan yang dibuat oleh penulis tidak menggunakan perspektif mnemohistory tetapi tulisan ini hanya ingin mengkoleksi narasi-narasi kecil yang muncul dalam masyarakat untuk membantu melihat bagaimana sumber lisan itu penting dalam membangun narasi kesejarahan.

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh St. Junaeda dan Amirullah yang berjudul “*Gang Action and Shifting Patterns of Patron-Client Relations in Southeast Gowa 1958-1961*” dalam tulisan ini memiliki relevansi dengan tulisan yang akan ditulis oleh penulis karena membahas tentang bagaimana aksi yang dilakukan oleh gerombolan DI/TII yang meresahkan masyarakat di Gowa. Selain itu disini juga dibahas mengenai bagaimana para gerombolan DI/TII mempengaruhi kekuatan sistem pemerintahan yang ada di Gowa akibat aksi dilakukan.

Dalam jurnal *Al- Hikmah* yang ditulis oleh Abdul Kahar, dkk (2022) dari



Universitas Islam Negeri Alauddin yang berjudul “*Konfrontasi Islam Ideologi Versi Abdul Qahar Muzakkar dengan Komunis di Desa Tompo Bulu*” yang memberikan gambaran awal bagi penulis tentang bagaimana masuknya DI/TII di Tompo Bulu dan gambaran awal bagi penulis mengenai pandangan masyarakat terhadap Islamisasi yang dipengaruhi oleh DI/TII. Namun, yang menjadikan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis berbeda terletak pada fokus tulisan ini yang ingin melihat pertarungan kelompok Komunis dengan Darul Islam yang sama-sama ingin menyebarkan pengaruhnya di wilayah pedalaman. Selain itu keterbatasan sumber dari tulisan ini yang hanya mencakup gambaran umum pengaruh DI/TII di Tompo Bulu karena itu selain relevan tulisan ini tentu berbeda dengan tulisan yang akan ditulis oleh penulis.

Dalam tulisan yang ditulis oleh Martin Rossler (2019) dengan judul “*Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*” memberikan relevansi dengan penelitian yang akan ditulis karena berkaitan dengan perubahan sistem pemerintahan yang dimana dalam tulisan ini perubahan itu didasarkan atas seberapa besar pengaruh suatu kampung dalam politik lokal. Dilihat dari gelar yang dimiliki oleh kampung tersebut dan luas wilayahnya menjadi penentu sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan yang dulunya dipimpin oleh

mpin *adaq*. Ini memberikan relevansi bagi perubahan sistem pemerintahan Tompo Bulu yakni dari Kapala ke Kepala Desa.



Dalam jurnal *Patingalloang* yang ditulis oleh Nur Aisyah, dkk (2018) yang merupakan mahasiswa angkatan 2014 Universitas Negeri Makassar yang berjudul “*Baraka: Basis pertahanan DI/TII di Sulawesi Selatan (1953-1965)*” menjadi penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis karena mengkaji tentang Baraka sebagai basis pertahanan DI/TII yang sama statusnya dengan Tompo Bulu sebagai basis pertahanan DI/TII di Pangkep hanya saja Baraka merupakan basis pertahanan pertama DI/TII saat memulai pergerakan di Sulawesi Selatan. Selain itu dalam jurnal ini juga menggunakan wawancara sebagai sumber penelitian dengan narasumber mantan gerombolan DI/TII karena itu jurnal ini dapat dijadikan sebagai penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan ditulis.

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Muh Iskandar Z (2019) dengan judul “*Aktivitas Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Pangkep (1953-1959)*” memberikan gambaran mengenai bagaimana DI/TII melakukan operasi di Pangkep. Bentuk operasi yang dilakukan oleh DI/TII di beberapa wilayah di Pangkep selain Tompo Bulu sebagai basis pertahanan DI/TII di Pangkep bahwa para gerombolan melakukan kekejaman dan kekerasan terhadap masyarakat kemudian bagaimana para gerombolan melakukan perlawanan terhadap Bissu yang ada di Pangkep karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dan pak yang ditimbulkan oleh adanya pemberontakan ini.

Dalam tulisan yang dieditori oleh Muh Aliq Ramadhan (2022) yang



berjudul “*Masyarakat Lakkang bercerita tentang sejarah Desanya*”. Dalam majalah ini dijelaskan mengenai bagaimana strategi Kahar Muzakkar dalam menjadikan Lakkang sebagai basis pertahanannya. Seperti halnya dengan Tompo Bulu di Lakkang sendiri sebagai basis pertahanan dikatakan bahwa masyarakatnya membantu dalam operasi yang dilakukan oleh gerombolan. Dalam majalah ini juga dijelaskan mengenai bagaimana DI/TII berakhir setelah kematian Kahar Muzakkar namun tetap memberikan pengaruh di Lakkang berupa perampokan sehingga dibutuhkan pengamanan di Lakkang tidak menutup kemungkinan Tompo Bulu memiliki pengaruh serupa dengan di Lakkang karena basisnya sebagai pertahanan DI/TII.

Dalam *Jurnal Khasanah* yang ditulis oleh Tisha Maulida Fazria, dkk (2023) yang berjudul “*Perlawanan Masyarakat Desa Gombang Tasikmalaya terhadap Gerakan DI/TII*” memberikan gambaran tentang Desa Gombang yang tidak aman karena kedatangan gerombolan DI/TII kemudian dilakukan kemanan oleh pihak TNI dengan memberikan senjata kepada para organisasi keamanan Desa seperti pagar Desa (PD). Di Desa Gombang mayoritas menganggap bahwa DI/TII membawa pengaruh buruk karena itu masyarakat melakukan perlawanan karena merasa bahwa kemanan mereka terancam namun terdapat keterangan yang menganggap bahwa ada beberapa gerombolan DI/TII

suka menolong.

Dalam *jurnal Historia* yang ditulis oleh Harianto mahasiswa pacasarjana



Universitas Padjajaran dengan judul “*Perlawanan DI/TII Terhadap Negara (Studi Tentang Terhadap Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan)*” dengan relevansi hubungan politik yang dibangun oleh Kahar Muzakkar dalam melakukan pergerakan dengan tokoh yang terlibat ini dapat dijadikan referensi mengenai bagaimana hubungan Kahar Muzakkar dengan pimpinan pemerintahan yang ada di Desa Tompo Bulu dulunya untuk menduduki wilayahnya.

Dalam *Jurnal Gema Wiralodra* yang ditulis oleh Diky Fikriansyah, DKK (2022) yang berjudul “*DI TII di Poleang : Awal masuk, Pengaruh, dan berakhirnya gerakan 1953-1965*”. Tulisan ini memiliki relevansi dengan apa yang akan ditulis karena akan membahas mengenai bagaimana pengaruh gerombolan DI/TII di daerah ini dan mengenai bagaimana gerakan ini berakhir di Poleang sebagai lokasi yang dikatakan strategis karena berdekatan dengan pantai sehingga memudahkan gerombolan untuk menjangkau markas mereka. Ini kemudian akan menjadi perbandingan bagaimana operasi yang dilakukan DI/TII untuk melihat bagaimana pengaruhnya.

Dalam sebuah *Skripsi* yang ditulis oleh Risna Kadir (2021) Universitas Islam Negeri Alauddin dengan judul “*Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan 1950-1965*” dalam tulisan ini tidak hanya digambarkan mengenai dampak

tif dari gerakan DI/TII tetapi juga dampak positif yang dibawa seperti oaran sistem peribadatan yang benar dala Islam telah diketahui oleh banyak



masyarakat. Selain itu adanya penghapusan strata sosial yang dilakukan oleh DI/TII karena dikatakan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang tidak membedakan ini juga memungkinkan terjadi di Desa Tompo Bulu karena adanya sistem kekarraengan dalam sistem pemerintahan di Desa tersebut. Selain itu dalam bidang pendidikan tidak hanya bacaan sholat dan mengaji yang diajarkan gerombolan juga memberikan pengajaran bahasa Indonesia dan akulturasi bahasa antar prajurit.

1.6.2 Landasan Konseptual

Proses terjadinya perubahan sosial diawali dari terciptanya atau munculnya kegiatan sebagai budaya dan peradaban baru, yang memiliki makna membangkitkan semangat baru untuk menjadi manusia baru, yang mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru.²⁰ Perubahan sosial merupakan suatu proses pergeseran struktur atau tatanan didalam masyarakat, yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat.²¹ Masyarakat Tompo Bulu adalah masyarakat yang mengalami perubahan sosial, bentuk perubahan sosial yang terjadi di Tompo salah satunya dipengaruhi oleh kedatangan gerombolan DI/TII. Perubahan ini dapat dilihat dari kepercayaan masyarakat Tompo Bulu yang mengalami pembaruan, dimana masyarakat kemudian menganggap bahwa



Agus Suryono. *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. Makassar: Bumi 019. Hlm. 18.

Lorentius Goa, “Perubahan Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat”, *teketik dan Pastoral*. Vol 2(2), 2017. Hlm. 53.

segala bentuk kepercayaan yang mengandung unsur animisme itu adalah suatu hal yang harus ditinggalkan, hingga saat ini masyarakat Tompo Bulu dikenal sebagai masyarakat religius yang tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur mistis.

Selain mengenai perubahan sosial penelitian ini juga membahas mengenai konsep pemberontakan. Pada awalnya pemberontakan hadir dari berbagai hal yang kemudian berakumulasi dan mendorong suatu peristiwa itu terjadi. Pemberontakan merupakan langkah-langkah membuat tuntutan terhadap kekuasaan, untuk perubahan tertentu terhadap undang-undang atau struktur-struktur kekuasaan. Karena itu pemberontakan dinilai pasti mempunyai sifat agresif yang merupakan tingkah laku individu yang bermaksud untuk mencelakakan orang lain yang dianggap lawannya.²² Sama halnya dengan pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan, yang bermula dari adanya rasa kekecewaan yang dialami oleh mantan gerilyawan yang kemudian menimbulkan suatu pemberontakan. Bentuk pemberontakan yang dilakukan oleh gerombolan DI/TII inilah yang kemudian menjadi langkah-langkah perlawanan bagi para gerilyawan untuk menunjukkan kekecewaan akibat tidak terpenuhinya hak-hak sebagai kaum yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.



Anhar Gonggong. *Abdul Qahar Muzakkar Dari Patriot Hingga* *ntak*. Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2004. Hlm 23.

1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini kedatangan DI/TII sangat mempengaruhi perkembangan Islam di Tompo Bulu. Pemerintahan DI/TII di berbagai daerah pada umumnya dinilai memberikan pengaruh negatif bagi masyarakat ini dikarenakan apa yang mereka lakukan untuk mendirikan Negara Islam dianggap memaksa dan meresahkan masyarakat. Berbeda dengan masyarakat Tompo Bulu yang menganggap kedatangan DI/TII lebih memberikan dampak positif dalam pembaruan agama.

Untuk membangun dan menjawab sebab akibat yang telah dirumuskan membutuhkan sumber tertulis maupun sumber lisan yang digunakan dalam penulisan historiografi sejarah. Adapun sumber yang telah didapatkan sampai saat ini terbagi atas beberapa jenis sumber yakni arsip, koran, dan wawancara. Arsip yang didapatkan berupa catatan masyarakat adat Balocci tahun 1926 yang diakses melalui website *nationaalarchief*, walaupun arsip ini dirilis sebelum datangnya DI/TII di Tompo Bulu tetapi arsip ini cukup membantu karena memberikan gambaran tentang kondisi alam dan kondisi masyarakat Tompo Bulu Balocci, secara umum dalam arsip ini kemudian akan membantu menjelaskan mengenai bagaimana latar belakang masyarakat sebelum kedatangan gerombolan DI/TII dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.



Selain arsip dokumen digunakan juga koran sebagai sumber dalam ini, adapun koran-koran yang digunakan diakses melalui website *her.nl*. Seperti koran yang diterbitkan *De Preangerbode* yang berjudul “Het

Bendewezen in Celebes Honderden Gevangenen Door Zuiveringsacties Bevrijd” artikel ini memberikan informasi tentang pembersihan tempat persembunyian komplotan DI/TII yang salah satunya dilakukan di daerah Balocci. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh *Indische Courant Voor Nederland* yang berjudul “Tientallen Bendeleden Gedood Bij Acties in Oost-Indonesia” dalam artikel ini terdapat informasi tentang meningkatnya keamanan di Balocci yang sebelumnya tidak aman akibat aktivitas DI/TII. Artikel lain yang diterbitkan oleh *De Nieuwsgier* yang berjudul “TNI bevrijdt ontvoerden” memberikan informasi tentang aktivitas gerombolan DI/TII yang meresahkan masyarakat karena perlawanannya dengan TNI di Soreang yang merupakan jalur menuju Desa Tompo Bulu.

Selanjutnya untuk menjawab sebab akibat dari penelitian ini maka dimanfaatkan narasumber yang ada di lapangan. Langkah awal dalam penelusuran narasumber adalah wawancara pada beberapa perangkat Desa Tompo Bulu seperti Bapak Kepala Desa Tompo Bulu dan Bapak ketua BPD Desa Tompo Bulu. Kemudian untuk langkah selanjutnya dalam penyelesaian penelitian, mulai dilakukan wawancara dengan masyarakat Desa Tompo Bulu yang memiliki pengetahuan atau memori terhadap kedatangan gerombolan DI/TII. Keseluruhan narasumber yang telah ditemui sampai akhir penelitian ini

terdapat 24 Informan yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda, oleh karena itu perlu dilakukan pengklasifikasian narasumber berdasarkan peran dan fungsi yang telah didapatkan. Klasifikasi ini kemudian dibagi menjadi 3



bagian yakni informan Kunci, Informan khusus, dan informan umum. Informan kunci dalam penelitian ini adalah masyarakat Tompo Bulu sebagai objek penelitian yang kemudian narasinya akan digunakan sebagai pokok pembahasan dalam tulisan ini, dan yang berperan sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah masyarakat Tompo Bulu yang memiliki memori tentang kedatangan DI/TII dan mereka yang pernah melihat langsung pendudukan DI/TII di Tompo Bulu. Informan khusus adalah informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, dalam penelitian ini kemudian menempatkan masyarakat yang pernah bergabung menjadi gerombolan DI/TII di Tompo Bulu sebagai informan khusus, ini dikarenakan informasi dari mantan gerombolan dapat dijadikan pembandingan dengan apa yang telah disampaikan oleh informan kunci. Kemudian informan umum adalah mereka yang memiliki informasi tentang kedatangan gerombolan DI/TII di Tompo Bulu, baik yang pernah mendengar dari pelaku sejarah secara langsung maupun mereka yang mendengar informasi kedatangan gerombolan DI/TII dari mulut ke mulut. Informan umum dalam penelitian ini kebanyakan berasal dari pemerintah Desa Tompo Bulu dan mereka yang memiliki hubungan dengan orang-orang yang pernah bergabung dengan gerombolan.

Dalam penyelesaian penelitian ini terdapat beberapa kendala yang dialami oleh penulis baik dari aspek bahasa, waktu, dan jarak lokasi penelitian. Penulis dapatkan bantuan dari pihak pemerintah Desa dalam melakukan wawancara. Masyarakat Tompo Bulu sebagian besar menggunakan bahasa Makassar sebagai bahasa sehari-hari, sedangkan penulis tidak memiliki kemampuan untuk



berbahasa Makassar, karena itu dalam tahap wawancara penulis didampingi oleh staf kantor Desa Tompo Bulu untuk berkomunikasi dengan narasumber secara langsung. Selain mengenai bahasa, penulis juga terkendala masalah waktu dan jarak lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang berada di pegunungan dengan kondisi akses jalan yang terbilang cukup terjal mengharuskan penulis untuk menghindari perjalanan saat musim hujan. Melihat dari berbagai kendala yang dialami oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa metode yang paling efektif dalam penelitian ini adalah dibutuhkannya persiapan berupa kemampuan berbahasa dan pengenalan karakteristik lokasi penelitian.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Penelitian yang relevan, landasan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tompo Bulu di Bawah Kepemimpinan Seorang Kapala, dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana keadaan Tompo Bulu dibawah kepemimpinan seorang kapala. Dalam bab ini akan dibahas mengenai diimulainya sistem pemerintahan kekarraengan di Tompo Bulu yang kemudian digantikan oleh sistem pemerintahan baru yang disebut kapala.

BAB III Narasi Masyarakat Tompo Bulu tentang DI/TII, dalam bab ini akan dibahas mengenai narasi masyarakat Tompo Bulu tentang



DI/TII yang pernah ada di Desanya. Adapun narasi yang akan dibahas dalam bab ini akan dibagi menjadi lima aspek yakni narasi DI/TII dengan Islam, Politik dan Kekuasaan, Pajak atau Upah, Keamanan, dan Pendidikan.

Bab IV Menjelaskan Mengenai Pandangan Masyarakat Tompo Bulu tentang Kedatangan Gerombolan DI/TII. Dalam bab ini kemudian akan dibahas mengenai bagaimana masyarakat Tompo Bulu mengenang gerombolan DI/TII. Selain itu juga akan dibahas mengenai bagaimana proses kontinuitas dan pelestarian budaya dari DI/TII yang masih bertahan hingga saat ini.

BAB V Penutup, Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TOMPO BULU : SISTEM PEMERINTAHAN, SOSIAL, EKONOMI, & KEAGAMAAN TAHUN 1813 1964

2.1 Tompo Bulu dibawah Kepemimpinan Kekaraengan

Masa pemerintahan dan kekuasaan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan pada tahun 1906-1942 merupakan periode penting yang menandai hubungan pemerintah lokal dan pemerintah Hindia Belanda. Penaklukan wilayah Sulawesi Selatan melalui perluasan kekuasaan oleh pasukan Hindia Belanda yang mengirim pasukan *Militaire Expeditie* ke Sulawesi Selatan pada tahun 1905, hal ini dilakukan untuk memaksa penguasa-penguasa di Sulawesi Selatan untuk tunduk, patuh, dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada pemerintah Hindia Belanda.¹ Melalui penandatanganan pernyataan pendek (*Korte Verklaring*)², pemerintah Hindia Belanda menempatkan diri sebagai penguasa yang sah. Mereka juga melakukan tugas-tugas pemerintahan dan melakukan kekuasaan langsung terhadap rakyat.³

Pada periode pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan tahun 1906-1942 ditandai dengan terjadinya perubahan besar. Kerajaan-kerajaan yang terdapat di wilayah Sulawesi Selatan dulunya merupakan kerajaan sekutu yang kemudian

¹ Edward L. Poelinggomang. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Kota Makassar 1906-1942*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004. Hlm. 2.

² Raja-raja yang berhasil ditaklukkan dipaksa untuk menandatangani pernyataan takluk kepada pemerintah Hindia Belanda. Perjanjian ini dikenal dengan *Korte Verklaring* atau pernyataan pendek yang berisi; Raja-raja tersebut tunduk kepada pemerintah Belanda, Mengakui daerah kerajaannya sebagai terlampir di wilayah Hindia Belanda, Tidak akan berhubungan dengan pemerintah asing tanpa seizin pemerintah Belanda. Poelinggomang, Op. Cit., Hlm 2.



dihapuskan dan dijadikan wilayah pemerintahan dan kekuasaan langsung pemerintahan Belanda.⁴ Bentuk perubahan lainnya dapat dilihat dari surat keputusan No 352 tahun 1916 bahwa telah ditetapkan pemekaran wilayah Pangkajene yang dibagi menjadi lima distrik yakni Segeri, Marang, Labakkang, Pangkajene dan Balocci.⁵

Pemerintah Hindia Belanda mengajukan suatu susunan penataan dan pelaksanaan pemerintahan di Sulawesi Selatan yang telah merubah bentuk pemerintahan bumiputera. Pada tahun 1917 melalui surat dari sekretaris pemerintahan tanggal 4 Agustus 1917 No. 1863/1 diputuskan untuk memulihkan susunan karaeng, aru, opu, atau galla yang lama dengan syarat apabila disetujui oleh para kepala penduduk yang terlibat dan keberadaannya masih tetap bertahan dalam masyarakat.⁶ Kemudian melalui surat keputusan gubernur Makassar dan daerah-daerah sekitarnya pada tanggal 11 Mei 1918 No. 86/XIX yang disusul dengan keputusan pada tanggal 13 Juli 1918 No 124/XI menyatakan bahwa karaeng Mandalle, Segeri, Marang, Labakkang, Bungoro, Pangkajene, dan Balocci berada langsung di bawah pimpinan pemerintah Hindia Belanda di Pangkajene.⁷

Daerah Balocci dipimpin oleh seorang karaeng yang dibantu oleh sembilan



ibid., Hlm 3

Zuid Selebes : De Inlandsche Rechtsgemeenschappen In De Onderafdeling ene (1920)". *Java Bode*. University of Groningen : 1953. Hlm 179.

ibid.

bid.

kapala kampung⁸ yang diantaranya bergelar Karaeng, Soelewatang, dan Galla. Sembilan kapala kampung ini adalah Bulu-Bulu, Padangtangeraya, Balocci, Birao, Bantimurung, Malaka, Padangtangelau, Lanne, dan Tondongkura yang dipilih langsung oleh penduduk sedangkan karaeng Balocci dipilih oleh kesembilan kapala kampung ini dan kepala ulama yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemilihan pejabat ini mengikuti aturan kebiasaan, karena itu para pejabat yang dipilih harus bergelar bangsawan yang memiliki kemurnian darah kebangsawanan, dan memiliki derajat yang tinggi diantara kebangsawanan di daerah itu. Pemerintah Hindia Belanda juga menambahkan persyaratan lain yaitu kesediaan, dapat bekerjasama dan yang paling penting adalah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Hindia Belanda.⁹

Wilayah Balocci memiliki sembilan kapala kampung yang dibawah oleh karaeng Balocci. Lima dari sembilan kepala itu mempunyai sub-kepala di bawahnya yang diangkat dan diberhentikan oleh karaeng Balocci atas usul kepala yang bersangkutan dan konsultasi dengan masyarakat terlebih dahulu. Empat diantaranya yang tidak termasuk adalah Lanne, Tondongkura, Bantimurung, dan Malaka yang tidak selalu menjadi milik Balocci.¹⁰ Keempat wilayah ini dikatakan pernah membentuk komunitas adat sendiri dan mengakui kekuasaan kekaraengan lain selain



Istilah “Kapala” menjadi lazim digunakan oleh masyarakat Tompo Bulu merupakan bahasa serapan dari bahasa Makassar, namun pada umumnya disebut “Kepala”.

Java Bode, Op. Cit., Hlm 5.

Java Bode, Op. Cit., Hlm 5.

Balocci. Kemudian yang menjadi hadat¹¹ Balocci yang sebenarnya adalah wilayah Bulu-Bulu, Padangtangeraya, Balocci dan Birao.¹² Wilayah Bulu-Bulu dan Padangtanga kemudian dinyatakan bersatu setelah terjadi perubahan sistem pemerintahan pada tahun 1964 dan menjadi satu wilayah Desa yang dinamakan Tompo Bulu. inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan penggabungan kedua wilayah ini, karena berada dalam satu wilayah hadat yang sama dan berada dalam satu pengaruh kekuasaan yang sama yakni kekaraengan Balocci.

Dalam referensi sejarah Desa yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tompo Bulu tahun 2022-2027 dijelaskan mengenai kekaraengan yang pernah berkuasa di Bulu-Bulu dan Padangtanga sebelum dilakukannya pemulihan pada tahun 1917. Di wilayah Bulu-Bulu sendiri terdapat tiga kekaraengan bersaudara yakni kekaraengan Balocci, kekaraengan Amarro, dan kekaraengan Tonasa yang diyakini memiliki hubungan dengan kerajaan Gowa. Di wilayah Padangtangnga terdapat satu kekarengan yakni kekaraengan Padangtangnga yang dipercaya memiliki hubungan dengan kerajaan Bone. Sistem kekaraengan ini kemudian terus digunakan hingga adanya sistem pemerintahan yang disebut “Kapala”.

2.1.1. Kekaraengan Balocci

Wilayah kekuasaan karaeng Balocci diyakini sebagai tanah leluhur atau *Butta*



Hadat yang dimaksud disini adalah satuan pemerintahan lain atau ahan bawahan kekaraengan Balocci.

Java Bode, Op. Cit., Hlm 199.

Toa yang ditandai oleh 7 bendera atau *Bila-bila* yang berdiri yaitu ganrang-ganrang, passalassakkang, oror-oroa, seko, mamangko, amarro, dan Tonasa. Balocci dikatakan sebagai tana toa dimana semua keturunannya akan meninggalkan kenangan dan kekayaan mereka di tanah leluhurnya. Karaeng Balocci adalah saudara tertua diantara ketiga kekaraengan bersaudara tersebut yang berdomisili di daerah *Passalassakkan* dengan wilayah kekuasaannya di *Nangka-Lappara*.

Pada masa pemerintahan karaeng Balocci daerah Bulu-bulu berada dibawah kekuasaan Sombae Ri Gowa oleh karena itu menurut cerita daerah bulu-bulu memiliki hubungan dengan daerah Gowa. Saat kepemimpinan karaeng Balocci juga dipimpin oleh dua orang kepercayaan yang dipercaya memiliki kekuatan sakti yakni *Lato' Banga-banga (Tau Rikatappaka)* yang artinya orang yang sangat dipercaya beliau adalah orang yang dipercaya karaeng Balocci untuk mengantarkan pajak hasil bumi yang dibayar kepada Sombae Ri Gowa, *Tu Barania (Orang yang pemberani)* beliau tidak gentar dalam hal kelanggengan dan keamanan di tanah Balocci. salah satu orang yang terkenal pada masa pemerintahan karaeng Balocci adalah *Koro Passena Balocci* yang menurut kisah beliau adalah perempuan yang tidak dapat terkalahkan, menyeramkan, ditakuti dan disegani oleh siapapun namun beliau selalu bijak dalam mengambil keputusan. Setelah berakhirnya masa kepimpinan karaeng Balocci kemudian dilanjutkan oleh anaknya *Mallannasi Daeng Paroto (Puang*

beliau memimpin hingga sebelum adanya pemimpin yang disebut Kapala.¹³



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tompo Bulu 2022-2027.

2.1.2 Kekaraengan Amarro

Menurut kisah karaeng Amarro merupakan adaik perempuan dari karaeng Balocci. beliau memiliki wajah yang terkenal cantik dan memiliki harta kekayaan yang berlimpah ruah semua alat dapur, perabot rumah tangga, alat pertanian, dan perhiasannya semua terbuat dari emas murni sehingga dia disebut sebagai saudara terkaya diantara 3 kekaraengan bersaudara tersebut. Kepemimpinan karaeng Amarro dilanjutkan oleh anaknya *Idabaeang Dg Bombong* tetapi tidak berlangsung lama karena konon beliau merantau ke negeri Belanda. Sampai saat ini keturunan dari karaeng Amarro tidak diketahui dan tidak meninggalkan jejak keturunan apapun di kampung bulu-bulu. Oleh karena itu untuk mengisi kepemimpinan di wilayah Amarro anak perempuan dari karaeng Balocci maju untuk melanjutkan kepemimpinan tersebut yakni *Toa Canning* melanjutkannya. Adapun daerah kekuasaan Amarro di kampung Bulu-bulu adalah daerah *Lappara-Paruna*.

2.1.3 Kekaraengan Tonasa

Karaeng Tonasa adalah saudara bungsu dari 3 kekaraengan bersaudara, beliau diberi gelar *Balibina Tonasa* yang artinya orang yang gagah, berani, kuat, perkasa dan teguh terhadap pendiriannya dalam hal kepemimpinan setelah kepemimpinan karaeng Tonasa dilanjutkan oleh Toa Gila/ Cole yang sekaligus menjadi pemimpin terakhir sebelum adanya pemimpin yang dikatakan kapala, adapun



n 16.

wilayah kekuasaan karaeng Tonasa adalah daerah Paruna-Kampoang.

Selain ketiga kekaraengan bersaudara Balocci, Amarro, dan Tonasa terdapat satu kekaraengan yang berbeda yakni kekaraengan Padangtanga. Berbeda dengan 3 kekaraengan bersaudara yang merupakan keturunan dari kerajaan Gowa, kekaraengan Padangtanga merupakan keturunan dari kerajaan Bone. Inilah yang menjadi alasan mengapa wilayah kekuasaan karaeng padangtanga berada diluar wilayah bulu-bulu.¹⁴

2.1.4 Kekaraengan Padangtangnga

Karaeng Padangtangnga yang merupakan keturunan dari kerajaan Bone mempunyai 3 anak yang masing-masing diberi nama *Karaeng Gillingeng*, *Karaeng Bari*, dan *Karaeng Sapa*. Karena 3 anak dari karaeng Padangtangnga sering berselisih maka karaeng Padangtangnga mengambil alih untuk menyelesaikan konflik dan menunjuk saudaranya untuk melanjutkan kepemimpinannya beliau adalah *I Puang Toa* atau *Kalu' Daeng Manai'*, kemudian dilanjutkan oleh adik dari *I Puang Toa* yakni *Mallarangeng Dg Patau*. Kepemimpinan *Mallarangeng Dg Patau* tidak berlangsung lama karena untuk pengembangan dan penataan kampung di wilayah Padangtangnga, Talaka'a, Tompo Lembang, Lanjengan, dan Karunrung kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh *karaeng Dangnge* selain untuk angan dan penataan kampung beliau juga mendirikan rumah untuk



Ibid., Hlm 17.

keturunannya yang disebut *Balla Lompo'a* yang ditempati oleh 7 kepala keluarga Manripi, Muha, Kalu, Ma'Sanang, Sangirang, Lato' Danti' dan Munri. Masa pemerintahan *Karaeng Dangnge* berakhir pada tahun 1945 sekaligus menjadi pemimpin terakhir kekaaraengan Padangtangnga.¹⁵

2.2 Tompo Bulu dibawa Kepemimpinan Seorang Kapala

Pada awal kekuasaan pemerintahan belanda di wilayah Sulawesi Selatan ditandai dengan terjadinya perubahan besar dan dahsyat, kerajaan-kerajaan yang terdapat di wilayah ini akhirnya dihapuskan dan dijadikan wilayah pemerintahan dan kekuasaan langsung pemerintah Hindia Belanda. Bentuk pemerintahan di wilayah itu yang bercorak kerajaan dan konfederasi sebagai suatu kesatuan dari beberapa wilayah kesatuan kecil dari satu kelompok kaum yang berpemerintahan sendiri ditiadakan. Aturan dan peraturan yang lama digantikan dengan aturan dan peraturan baru yang ditetapkan pemerintah. Pada dasarnya dapat dikatakan pada masa itu terjadi perubahan politik yang dahsyat dalam bidang penataan dan pelaksanaan pemerintahan, penetapan dan penerimaan kebijaksanaan serta pengaruh kelompok lapisan terhadap kebijaksanaan pemerintah.¹⁶ Di Tompo Bulu sendiri pimpinan kapala kemudian muncul ketika berakhirnya pemerintahan kekaaraengan di kedua wilayah yakni Bulu-Bulu dan Padangtangnga. Kedua wilayah ini kemudian masing-masing memiliki pimpinan pemerintahan yang juga disebut dengan nama kapala,

ing telah disebutkan sebelumnya kedua wilayah ini merupakan bagian dari



Ibid., Hlm 18.

Poelinggomang, Op Cit., Hlm 3.

kekuasaan karaeng Balocci. Meskipun kemudian sistem pemerintahan kekaraengan berakhir di kedua wilayah ini, namun selanjutnya dipulihkan dan digantikan oleh model pemerintahan baru yang tetap diawasi oleh pemerintah Hindia Belanda.¹⁷

2.2.1 Bulu-Bulu dibawah Kepemimpinan Seorang Kapala

Di kampung Bulu Bulu pada awalnya yang terdiri dari tiga kekaraengan bersaudara yakni Balocci, Amarro dan Tonasa namun kemudian hanya dua dari ketiga kekaraengan ini yang melanjutkan sistem pemerintahan yang disebut Kapala yakni hanya Balocci dan Tonasa. Untuk kekaraengan Amarro sendiri dikatakan bahwa keturunannya pergi ke negeri Belanda untuk melanjutkan pendidikan karena itu tidak ada yang dapat melanjutkan kepemimpinan di wilayahnya.

Kedua kekaraengan yang tersisa masing-masing memiliki pimpinan yang disebut kapala. Untuk kekaraengan Balocci pimpinan kapala dikatakan sudah ada sejak tahun 1813 yang pada awalnya dikepalai oleh Toa Sangngi yang diyakini sebagai orang yang dituakan dan merupakan cucu dari nenek Mallomo karena jika umurnya sudah tua dia kembali menjadi muda lagi yang dipercaya bahwa beliau hidup selama 300 tahun dan menjabat sebagai kapala selama 42 Tahun sejak 1813 hingga 1855. Setelah kepemimpinan Toa Sangngi berakhir kemudian dilanjutkan oleh kerabatnya yakni Baco Patta atau akrab dipanggil I Toa Lolo ini dikarenakan

idupnya beliau selalu terlihat muda. Masa pemerintahan I Toa Lolo tidak

“Zuid Selebes : De Inlandsche Rechtsgemeenschappen In De elling Pangkadjene (1920)” . *Java Bode*. University of Groningen : n 179.



berlangsung lama yakni sejak tahun 1855-1863 ini dikarenakan beliau sibuk mengurus barang dagangan dan ternaknya yang konon pada saat itu beliau mempunyai 200 ekor kerbau dan 600 ekor kuda, beliau juga menjadi kapala terakhir Balocci sebelum digabungkan dengan Tonasa. Untuk wilayah Tonasa sendiri sistem kepemimpinan kapala sudah berdiri sejak tahun 1813 yang pada awalnya dipimpin oleh Lato Sore hingga tahun 1815, dan kemudian digantikan oleh sepupunya sendiri yakni Toa Congke yang berkuasa hingga masa sebelum digabungkan dengan Balocci yakni pada tahun 1863.

Setelah tahun 1863 kepemimpinan wilayah kekarraengan Balocci dikatakan pernah dipegang oleh Wa' Samania atau Samudda kemudian pada masa pemerintahan beliau wilayah kekarraengan Balocci, Amarro, dan Padangtangnga digabungkan. Pada masa inilah diperkirakan pengaruh kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dimulai yang ditandai dengan berakhirnya kekuasaan kekarraengan di wilayah tersebut dan digantikan dengan susunan pemerintahan baru dimana untuk tingkat daerah adat dan kampung berada di bawah pejabat pemerintahan bumiputra yang masing-masing dijabat oleh regen dan kapala kampung. Wa Samania berkuasa selama 49 tahun yakni sejak tahun 1863 hingga 1912 dan menyerahkan kepemimpinannya kepada menantu pertamanya yang bernama Baco Bu'ring. Baco Bu'ring yang akrab disapa dengan sebutan Wa' Kapala berasal dari luar kampung

lu yaitu dari kampung Bu'ring, beliau berkuasa selama 31 Tahun sejak
3. Kemudian pada akhir kepemimpinannya Baco Bu'ring mengadakan



pencalonan sebagai pengganti dirinya yang diantaranya adalah anaknya sendiri yang bernama I.B. Dg. Palallo dan adik iparnya yang bernama Pasumburi Dg. Marowa. Dan berdasarkan hasil pemilihan dengan suara terbanyak dimenangkan oleh Pasumburi Dg. Marowa. Pada masa pemerintahan Pasumburi Dg. Marowa inilah kemudian kampung Bulu Bulu dikuasai oleh gerombolan DI/TII yang mengakibatkan setiap saat selalu terjadi pertempuran dengan tentara kota sehingga kehidupan masyarakat serba tidak menentu.¹⁸ Kepemimpinan pasumburi Dg. Marowa kemudian berakhir pada tahun 1964 setelah penggabungan kedua wilayah kampung menjadi satu Desa yang resmi mengikuti sistem pemerintahan yang berlaku di Balocci sebagai pusat pemerintahan.

2.2.2 Padangtangnga dibawah Kepemimpinan Seorang Kapala

Berbeda dengan yang terjadi di Bulu-Bulu dimana pimpinan kapala sudah ada sebelum abad ke-20, di Padangtangnga sendiri diperkirakan pimpinan kapala baru ada sejak tahun 1945 ini dikarenakan pemerintahan kekaraengan yang terjadi di Padangtangnga masih sangat kental dan masih dipercaya hingga tahun 1945 kemudian sistem pemerintahan kekaraengan di Padangtangnga diubah mengikuti sistem pemerintahan baru yang sudah terjadi di Bulu-Bulu dan Balocci sebagai pusat pemerintahan pada saat itu.¹⁹



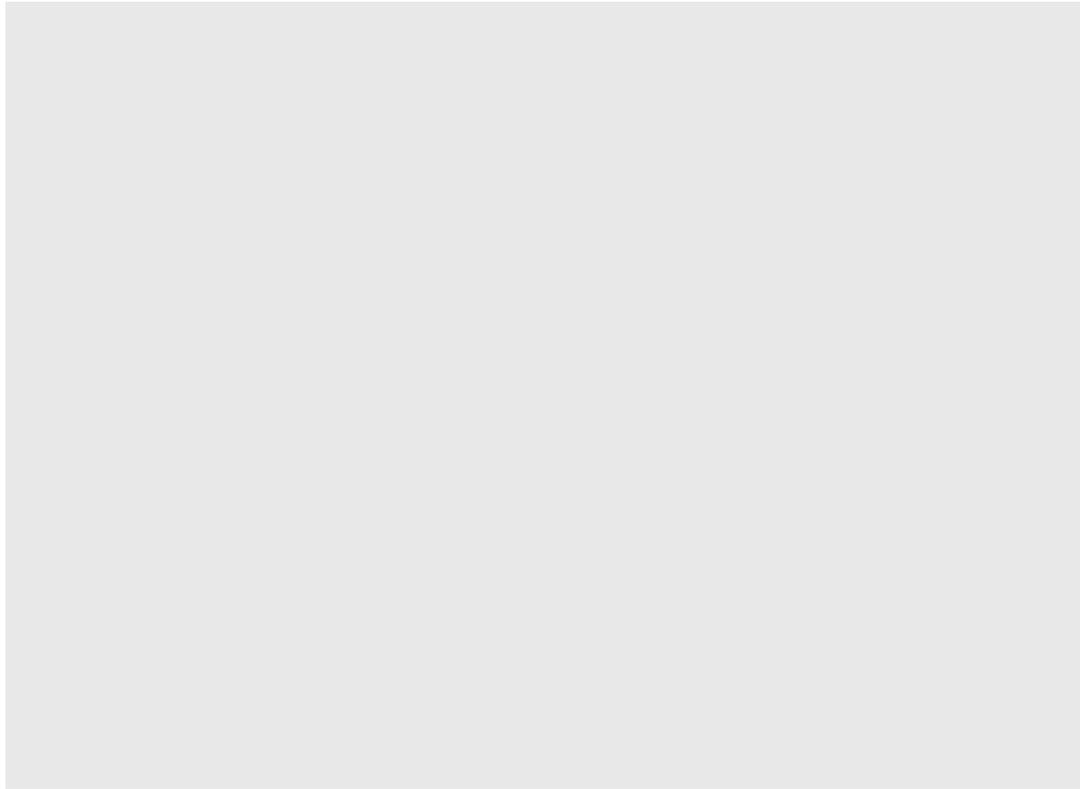
RPJM Desa Tompo Bulu., Op. Cit., Hlm 19.

Wawancara Mursalin. Laki-laki. Tompo Bulu, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. 9 September 2024. 58 Tahun. Sekdes Tompo Bulu.

Setelah masa pemerintahan kekaraengan di Padangtangnga berakhir kemudian sistem pemerintahan selanjutnya beralih dan dipimpin oleh seorang kapala. Kapala pertama yang menjabat di Padangtangnga adalah Puang Bero, beliau menjabat dari tahun 1945 hingga 1949. Selama masa pemerintahannya Puang Bero telah menata pemerintahan dan mendirikan sekolah pertama di kampung Bajeng, hanya saja sekolah yang dimaksud disini belum dapat dibuktikan keberadaannya karena sebagian masyarakat menganggap sekolah baru ada sejak masa kekuasaan gerombolan DI/TII. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Puang Bero pada tahun 1949 kemudian digantikan oleh kapala yang bernama Daeng Gassing hanya saja masa kepemimpinannya berlangsung hanya satu tahun hingga tahun 1950. Kemudian setelah kepemimpinan Daeng Gassing wilayah Padangtangnga dipimpin oleh seorang kapala bernama Pabeta Dg Mangngalle yang sekaligus menjadi kapala terakhir setelah penggabungan wilayah Bulu Bulu dan Padangtangnga. Pabeta Daeng Mangalle mulai menjabat sejak tahun 1950 hingga 1964 sekaligus menjadi perwakilan Padangtangnga dalam pemilihan Kepala Desa dengan wilayah Bulu Bulu



2.3 Keadaan Penduduk



Gambar 1: Pembagian Wilayah 4 kekarraengan di Tompo Bulu

Dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh A.S Spoor yang berjudul *Adatgemeenschap Balotji* memberikan gambaran mengenai letak geografis dan kondisi penduduk masyarakat adat Balocci pada tahun 1926. Wilayah Balocci memiliki luas 45 km² dengan batas wilayah di sebelah utara berbatasan langsung dengan kampung Bulu-bulu, Gantarang, Tanete, dan Bulu Lamuru. Sebelah selatan dengan Kampung Laia, Cenrana, Leang-leang, Turikale, Tanparang, dan Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Kassi, Jennae, Bangkeng



Sakiang, Bu'nea, Tondong, dan Mangilu. Di wilayah Balocci sendiri, di Bagian utara terdapat kampung Malaka, Tondongkura, dan Lame. Bagian timur terdapat kampung Lanne, Birao dan Padangtangeraya. Bagian selatan terdapat kampung Padangtangeraya, Bulu-bulu, dan Padangtangelau. Di bagian barat terdapat kampung Padngtangelau, Balocci, dan Malaka.²⁰

Sebagian besar masyarakat di Indonesia memiliki hubungan baik linguistik, budaya, maupun sejarah. Sebagian besar suku Bugis mendiami Sulawesi Selatan bagian tengah sehingga menjadi satu satunya suku yang bersentuhan langsung dengan suku lain yang ada di Sulawesi Selatan. Keadaan ini yang menyebabkan mereka memiliki berbagai persamaan dengan suku-suku lainnya.²¹ Di kabupaten Pangkep sendiri terdapat dua suku yakni suku Bugis dan Makassar umumnya bahasa yang digunakan adalah bahasa Bugis dan Makassar. Dominan masyarakat yang menggunakan bahasa Bugis adalah mereka yang berdomisili disekitar pusat kota Pangkep atau bagian Kecamatan Pangkep sedangkan mereka yang menggunakan Bahasa Makassar adalah masyarakat yang berada disekitar pulau dan pegunungan. Penduduk Balocci sebagian besar adalah suku Makassar, namun masih banyak masyarakat Bugis yang menetap di Balocci dan tetap menggunakan bahasa Bugis sebagai bahasa sehari-hari.²² Penduduk Tompo Bulu bersal dari suku Bugis Makassar namun mayoritas penduduknya berasal dari suku Makassar yang juga



A.S. Spoor. Adatgemeenschap Balotji. 1926. Hlm 1.

Cristian Pelras. *Manusia Bugis* . (Jakarta : Nalar bekerja sama dengan carta-Paris EFEO). 2005.. Hlm 15.

A.S. Spoor, Op.Cit., Hlm 11.

menggunakan bahasa Makassar sebagai bahasa sehari-hari dengan menggunakan logat yang disebut *dentong* karena itu cara berbicara penduduk Tompo Bulu memiliki ciri khas tersendiri.

2.3.1 Agama dan Kepercayaan Masyarakat

Sebagian besar orang Bugis Makassar menganut kepercayaan animisme yang mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Para leluhur mempunyai kedudukan yang berstruktur, mulai dari yang terendah sampai kepada yang tertinggi. Kepercayaan orang Bugis Makassar terhadap arwah nenek moyang dinyatakan dalam bentuk pemujaan terhadap kuburan dan tempat-tempat tertentu. Pemujaan diberikan terhadap kuburan orang-orang tertentu yang mereka anggap berjasa pada masyarakat, baik karena mereka pernah memberi sumbangan dalam pemukiman atau karena semasa hidup mereka dianggap sebagai tokoh rohaniawan dalam masyarakat.²³ Sebagian besar masyarakat Balocci menganut agama Islam, walaupun penyembahan patung masih terjadi dalam jumlah yang kecil. Sejak masa kekaraengan Balocci, rumah ibadah atau yang disebut *Langkara* di dirikan seluruh kampung. Kemudian pada tahun 1925-1926 baru dibangun masjid di kampung Balleanging yang dananya sebagian besar dari sumbangan penduduk Desa.²⁴

Masyarakat Tompo Bulu dulunya juga memiliki kepercayaan animisme



Mustaqim Pabbajah., "Religiusitas dan Kepercayaan Masyarakat Bugis". *Jurnal Al-Ulum*. Vol 12(2). 2012. Hlm 398-399.
Ibid., Hlm 12.

seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sejak dulu masyarakat Tompo Bulu menganut agama Islam sebagai agama yang dibawa oleh nenek moyang mereka, dengan unsur animisme yang masih melekat masyarakat Tompo Bulu dulunya juga melakukan pemujaan terhadap arwah nenek moyang mereka. Seiring berjalannya waktu masyarakat Tompo Bulu yang mengalami perubahan pimpinan pemerintahan dari pemimpin kapala ke Kepala Desa juga mengalami perubahan dari segi agama dan kepercayaan. Kepala Desa terpilih H. Ambo Mase merupakan sosok yang sangat anti terhadap kepercayaan animisme. Karena itu dengan program yang dijalankan oleh beliau kepercayaan animisme di Tompo Bulu perlahan mulai dihapuskan. Berbagai penolakan tentunya datang dari berbagai pihak namun sebagian besar masyarakat mulai mendukung. Segala hal yang berbau mistis dihapuskan oleh beliau dengan alasan untuk menjadikan Desa Tompo Bulu sebagai Desa religius, hingga saat ini citra Desa Tompo Bulu sebagai Desa religus masih terus dilestarikan tanpa adanya unsur mistik walaupun sebagian masyarakatnya masih mempercayai hal tersebut.

2.3.2 Mata Pencaharian

Balocci adalah daerah pegunungan dengan ketinggian mencapai 1300m, letak Bulu-bulu dan Padangtanga yang berada pada ketinggian membuat wilayah ini dikelilingi oleh pegunungan, diantaranya adalah Bulu Lamporaka, Bulu Tebissoa, Batu Pute, Batu Mararang, dan Bulu Saraung yang tingginya mencapai



1367m di atas permukaan laut.²⁵ Letaknya yang berada di daerah dataran tinggi membuat tanah di wilayah ini subur, masyarakat Bugis Makassar mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, karena itu kondisi kesuburan tanah di daerah Bugis Makassar sangat mempengaruhi mata pencaharian mereka sebagai seorang petani. Masyarakat Balocci memiliki sawah yang dialiri oleh pipa irigasi, walaupun jumlahnya yang tidak banyak hasil panen ini cukup untuk keperluan pribadi Masyarakat. Selain itu masyarakat juga memiliki kebun yang digunakan untuk menanam sayuran yang kemudian akan dijual di pasar-pasar seperti pasar Tonasa, Balleanging, Padangtangnga, dan Tondongkura.²⁶ Masyarakat yang tinggal disekitar pesisir mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Mata pencaharian terakhir yang banyak digeluti oleh masyarakat Bugis Makassar adalah pedagang karena hasil dari petani dan nelayan akan didistribusikan kepada para pedagang untuk diperjual belikan kepada masyarakat. Dari semua inilah masyarakat Bugis Makassar mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu masyarakat Bugis Makassar pada masa sekarang yang mengenyam pendidikan tingkat tinggi mulai masuk ke dunia birokrasi pemerintahan.²⁷

Masyarakat Tompo Bulu mayoritas bermata pencaharian sebagai seorang petani. Kondisi ini didukung oleh letak Tompo yang berada pada ketinggian dan kondisi tanah yang cocok untuk lahan pertanian. Selain sebagai petani masyarakat



Ibid., Hlm 2.

Ibid., Hlm 17.

Fifi Fatmawati, Heri Kurnia. "Mengenal Kebudayaan Suku Bugis". *JISBli*. 2024. Hlm 75-76.

Tompo Bulu juga memanfaatkan lahan hutan pohon Nira atau pohon Aren dalam pembuatan gula aren sebagai salah satu ciri khas masyarakat Tompo Bulu. Untuk mendistribusikan hasil pertanian dan produk gula aren beberapa masyarakat juga memilih menjadi pedagang yang mengantarkan langsung kepada distributor di pasaran ataupun langsung kepada masyarakat. Selain itu mereka juga melakukan pertukaran atau sistem *Barter* antara hasil hutan yang mereka miliki seperti gula merah yang ditukarkan dengan garam dan ikan dari daerah dataran rendah.²⁸ Tidak sedikit masyarakat Tompo Bulu yang memiliki pendidikan tinggi memilih untuk masuk ke dunia birokrasi sebagai sumber mata pencaharian bahkan salah satu program yang berjalan di Tompo Bulu sekarang adalah “Satu rumah satu sarjana” karena itu hingga saat ini banyak masyarakat Tompo Bulu yang memilih untuk merantau untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.



A.S. Spoor, Op.Cit., Hlm 11.